

Tangkap Irjen Teddy Minahasa, Mahfud MD Puji Kapolri Listyo

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memuji langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menindak Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra. Perwira tinggi bintang dua Korps Bhayangkara itu ditangkap karena diduga terjerat kasus narkoba.

"Di kasus Teddy Putra Minahasa ini, itu kalau dilihat sisi positifnya bagus Polri, menindak itu di dalam suasana seperti sekarang," ujar Mahfud dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (16/10).

Jika dilihat dari sisi negatif dalam kasus tersebut, Mahfud menyebut keterlibatan Teddy bisa saja dibiarkan begitu saja setelah polisi menangkap seorang perempuan bernama Linda yang mengedarkan narkoba.

Dalam pemeriksaan usai penangkapan, perempuan tersebut lantas menyebut keterlibatan Teddy. Menurut Mahfud, polisi bisa saja menutupi pengakuan perempuan tersebut atas keterlibatan Teddy. Akan tetapi, Kapolri justru mengambil langkah tegas dengan menindak Teddy.

"Tetapi, Kapolri mengambil langkah tegas kan untuk melakukan itu (menindak Teddy). Itu segi positifnya,

iya kalau Anda polisi itu menangkap seorang perempuan bawa narkoba lalu dia ditahan aja diproses hukum," ujar Mahfud.

"Pengkakuannya ditutup bahwa dia bekerja sama dengan Teddy, misalnya. Tapi, ini dilakukan oleh Kapolri, ungkap, tangkap, pecat, kan begitu Kapolri," ujarnya.

Sebelumnya, polisi mengungkap bahwa Teddy terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Teddy ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (15/10) setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (13/10/2022).

"Sudah ditetapkan Bapak TM jadi tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juhasa di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jumat (14/10). Teddy dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 sub-sider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun.

Imbas kasus ini, Teddy batal ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Selain itu, dia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kini dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri. ● han

Kompolnas Bakal Pantau Gaya Hidup Pejabat Polri

JAKARTA (IM) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengawal sejumlah arahan presiden Joko Widodo yang berikht kepada pejabat tinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Sabtu (14/10) lalu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para pejabat terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) Markas Besar (Mabes) Polri, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) seluruh Indonesia.

Dalam arahnya, Kepala Negara meminta pejabat Polri dan anggotanya tidak menunjukkan gaya hidup mewah di tengah situasi perkembangan resesi ekonomi global dan setiap pejabat dan anggota Polri diminta memiliki sense of crisis.

"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, poin-poin arahan Presiden terhadap Polri akan dipantau dan dilakukan penilaian oleh Kompolnas, Termasuk gaya hidup mewah," ujar Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/10).

"Hasil pantauan Kompolnas akan disampaikan kepada Presiden dan juga Kapolri. Kami akan terus memantau gaya hidup anggota Polri yang dimaksud Presiden," ucapnya.

Kendati demikian, Kompolnas meyakini bahwa seluruh pejabat Polri yang hadir maupun pejabat lainnya yang berhalangan hadir, begitu juga seluruh anggota Polri akan mampu melaksanakan arahan Kepala Negara tersebut.

"Karena bagaimana pun dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi, telah ada tuntutan kepada anggota Polri untuk tidak menunjukkan bergaya hidup mewah," kata Yusuf.

Menurutnya, Presiden Jokowi berfungsi sebagai penggugah komitmen dan konsistensi untuk mengesawantahkan Tri Brata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi sebagai anggota Polri. Dalam hal memberikan arahan, kata Yusuf, Presiden menekankan agar para pejabat Polri bisa menghentikan alias "ngerem" gaya hidup mewah.

Sebab, berdasarkan hasil survei yang diyakini Presiden, gaya hidup mewah merupakan salah satu bagian yang keluhan masyarakat.

"Di sini seolah tampak adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu Presiden mengharap agar anggota Polri dalam bergaya hidup tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat," papar Yusuf.

Dalam hasil suatu penelitian gaya hidup merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan pelanggaran. Dengan demikian, Kompolnas menilai arahan Presiden Jokowi kepada pejabat tinggi di Korps Bhayangkara itu sudah sangat tepat.

"Polri harus Presisi dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," kata Yusuf. "Kompolnas tegak lurus kepada arahan Presiden dalam mengawasi kinerja dan integritas Polri," tuturnya. ● mei

Akbar Tanjung: Saya Tidak Menyatakan Dukong Anies Capres

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung meluruskan pernyataan soal dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

"Yang saya hormati Pak Gubernur Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta Bapak Anies Baswedan dalam organisasi KAHMI, dia sebetulnya masih junior saya. Tentu saja saya bangga sebagai senior bahwa beliau menjadi calon presiden," kata Akbar Tandjung ketika memberikan sambutan di Taman Menteng, Jakarta, Rabu (5/10).

"Amiinnn (mengaminkan Anies jadi Presiden)," teriak sejumlah tamu undangan.

Akbar yang juga salah satu aktivis angkatan 66 itu melihat Anies sosok yang sangat kuat menjadi Presiden 2024. Ia pun secara tegas bakal mendukung Anies. "Lalu peluang beliau di Pemilu 2024 yang akan datang sangat kuat untuk menjadi presiden. Karena itu saya juga pakai baju kuning. Karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden," ucap Akbar. ● han

sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Hal itu disampaikan saat peresmian relokasi monumen tritura aktivis angkatan 66 di Taman Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya tidak menyatakan mendukung itu (Anies). Anies Baswedan junior saya dalam organisasi yaitu HMI KAHMI," kata Akbar saat ditemui di Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (16/10).

Sebagai senior, Akbar menyatakan dukungan itu kepada Anies yang merupakan juniornya di HMI.

"Sebagai junior tentu saya hormati. Junior saya hormati," kata Akbar.

Akbar Tandjung, politikus senior Partai Golkar yang juga mantan Ketua DPR, secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan untuk maju

2 Polhukam

FOTO/ANT



HUT KE-58 PARTAI GOLKAR
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) beryanyi bersama vokalis band Ungu Pasha (kedua kiri) usai mengikuti jalan sehat di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/10). Partai Golkar menggelar jalan sehat dalam rangka memperingati HUT ke-58 Partai Golkar.

Banyak Pengaduan Masyarakat Justru Dijadikan Alat Pemerasan oleh Aparat

Mahfud sebut informasi pemerasan terhadap masyarakat justru kerap dilakukan aparat penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, banyak laporan atau pengaduan masyarakat (Dumas), justru dijadikan alat oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemerasan.

Biasanya kata dia, oknum aparat penegak hukum bekerja sama dengan pihak yang melaporkan untuk memeras

yang dilaporkan. Menurutnya, persekongkolan jahat ini merupakan bentuk kolusi antara oknum aparat penegak hukum dengan pihak swasta.

"Banyak laporan, Dumas (Pengaduan Masyarakat) di aparat penegak hukum (APH) sering dijadikan alat untuk memeras orang yang dilaporkan," kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (16/10).

"Bahkan terkadang si pe-

lapor bermain dengan aparat untuk memeras dan berbagi hasil. Ini bentuk kolusi antara oknum APH dan swasta serta (terkadang) LSM jadi-jadian," imbuhnya.

Dikatakan Mahfud, informasi pemerasan tersebut terjadi di lembaga aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karenanya, tak sedikit oknum aparat di masing-masing lembaga yang telah dilakukan penindakan.

"Pimpinan responsif tentang ini. Makanya banyak oknum APH yang ditindak oleh pimpinannya baik dari Polri, kejaksaan bahkan di KPK," kata Mahfud.

"Maka itu silahkan jika msh ada yang mengalami pemerasan seperti itu 'laporkan', jangan takut asal jelas pelaku dan obyeknya. Harus ada keberanian untuk melapor dan menindak," ujarnya.

Tangkap Bandar Judi

Selain itu, Mahfud MD juga menyoroti penangkapan bandar judi online kelas "kakap" Apin BK yang kabur ke Malaysia. Apin BK dijemput langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Bandara Soetta, Tangerang, Banten.

Mahfud menilai, penang-

kapan narapidana (napi) yang telah kabur ke luar negeri tidak mudah. Namun, langkah Kapolri menunjukkan sisi positif institusi Polri setelah diterpa rentetan kasus.

"Saya yang terakhir banyak menjadi perhatian publik penangkapan bandar judi yang dicokot dari luar negeri karena mereka lari dari sana lalu diambil itu kan luar biasa tidak mudah mengambil narapidana itu yang sudah lari ke luar negeri kalau tidak punya kesungguhan dan jaringan kuat serta memberi pengertian kepada negara lain untuk mengambil itu," katanya. ● mar

Lukas Enembe Telah Diperiksa Dokter dari Singapura, KPK: Tak Dijadikan Rujukan

JAKARTA (IM) - Tim dokter dari Singapura telah rampung melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, beberapa hari lalu. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal itu tidak akan digunakan sebagai rujukan.

Tim dokter dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura diundang langsung oleh Lukas setelah ia dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK meminta hasil pemeriksaan medis Lukas Enembe oleh tim dokter Singapura tersebut. Namun, KPK tidak akan menjadikan hal itu sebagai rujukan atau dasar. KPK tetap menerjunkan tim kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Lukas.

"Kemarin kan diperiksa yang bersangkutan ini oleh dokter Singapura. Kita akan minta hasil pemeriksaan. Meskipun, untuk penegakan hukum itu kesehatan itu harus diperiksa oleh tim dokter yang independen. Kita sudah

berkoordinasi dengan IDI," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Minggu (16/10).

"Dan ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengirim tim kesehatan dari IDI untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai second opinion. Jadi kita tidak serta merta menerima dokter dari Singapura itu," sambungnya.

Sebelumnya, Lukas menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi dari Singapura. Hasilnya, Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrasitras atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.

Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pi-

hak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Sebagai informasi, Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. ● mei

Putri Candrawathi Disebut Depresi Jelang Sidang Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum Putri Candrawathi, Febri Dianyah mengatakan ia belum bertemu lagi dengan kliennya menjelang sidang kasus pembunuhan Brigadir J.

Pertemuan terakhir, kata Febri, terjadi pada Kamis 13 Oktober 2022 di Rutan Kejaksaan, padahal besok PN Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perkara pembunuhan Brigadir J.

"Kami belum bertemu Bu Putri lagi. Terakhir diperbolehkan ketemu di Rutan Kejaksaan pada hari Kamis (13/10).

Saat tim Kuasa Hukum mau besuk Jumat sudah tidak diperbolehkan," kata Febri saat dihubungi, Minggu (16/10).

Sebagai kuasa hukum, Febri mengaku khawatir. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater di Rutan Kejaksaan, Putri

didiagnosis depresi.

"Tentu saja Kami khawatir dengan kondisi Bu Putri, apalagi sebelumnya dari pemeriksaan psikiater di Rutan Kejaksaan, disebut Bu Putri memiliki gangguan psikologis sesuai dengan diagnosis depresi," ucapnya.

"Kami sudah sampai-kan sebelumnya, Ibu Putri sebenarnya rela ditahan. Namun perlu diingat juga kondisi psikis seperti tertuang di Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tertanggal 6 September 2022 lalu," ujarnya.

Kendati demikian, Febri menegaskan bahwa pihaknya akan tetap kooperatif dalam menjalani proses persidangan mendatang.

"Namun demikian, kami komitmen untuk kooperatif menjalani proses persidangan sesuai jadwal yang ditentukan," katanya. ● mei

KPU Harap Verifikasi Faktual 9 Parpol Nonparlemen Rampung

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, berharap proses verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik (parpol) nonparlemen bisa segera selesai.

Mengacu pada Pasal 173 Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan partai nonparlemen atau yang tidak lolos parliamentary threshold 2019 menjalani verifikasi faktual.

"Mudah-mudahan hari ini, Minggu (16/10) sore kita selesaikan verifikasi faktual untuk kepemimpinan di tingkat nasional," kata Idham dalam webinar Menakar Kekuatan 18 parpol Calon Peserta Pemilu 2024 yang disiarkan di Youtube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Minggu (16/10).

Idham menuturkan, ada 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dari jumlah tersebut, hanya 43 parpol yang memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sebanyak 40 parpol kemudian mendaftar namun hanya 24 parpol yang berkas mereka dinyatakan lengkap.

Setelah itu, hanya 18 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Sebanyak 9 di antaranya partai parlemen sementara sisanya

partai nonparlemen. Adapun partai tersebut antara lain, Partai Gelora, Garuda, PSI, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Bulan dan Bintang, Partai Hanura, dan Perindo.

"Jadi ada sembilan parpol nonparlemen yang saat ini sedang kita langsung verifikasi faktual," ujarnya.

Selain di tingkat nasional, kata Idham, KPU di tingkat Kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga sedang melakukan verifikasi faktual. Jika di tingkat nasional dinyatakan terdapat 18 parpol lolos verifikasi administrasi, di tingkat lokal Aceh terdapat enam parpol.

"Partai lokal Aceh ada dua parpol *parliamentary treshold* dan ada empat parpol baru yang saat ini sedang diverifikasi faktualnya," tutur Idham.

Adapun dalam verifikasi faktual, KPU memeriksa dokumen terkait pendaftaran, kepemimpinan, keterwakilan perempuan, alamat kantor, hingga keanggotaan parpol. Ia menyebut, keterwakilan perempuan di partai tingkat nasional bersifat wajib. Sementara, di tingkat provinsi, kabupaten/kota tidak wajib.

"Karena dalam UU frasanya memperhatikan," kata Idham. ● mei



KRI BIMA SUCI BERLAYAR MENUJU SURABAYA
Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan ke-69 melaksanakan Peran Parade Roll di atas KRI Bima Suci-945 saat akan bertolak menuju Surabaya di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (16/10). Kapal Layar Latih Akademi Angkatan Laut KRI Bima Suci-945 yang tiba di Bali pada Selasa (11/10) dalam rangkaian melaksanakan pendidikan taruna serta menjalankan misi diplomasi dan budaya selama 84 hari tersebut kembali melanjutkan pelayaran menuju Surabaya, Jawa Timur.